-
-
www.lib.umtas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam hak asasi manusia. Seperti yang terkandung dalam Dasar Negara Pancasila terutama sila ke lima yang juga mengakui adanya hak asasi warga negara. Hak ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya yang ada di bidang kesehatan dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2014).

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Menurut UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pelaksanaannya sejak 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Fathoni dan Kusuma, 2015).

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-

-
-
www.lib.umtas.ac.id

Program jaminan kesehatan dijalankan secara Nasional dengan prinsip asuransi sosial, prinsip ekuitas, dan sistemnya berupa sistem gotong-royong dimana peserta mampu dan sehat akan membantu peserta yang miskin dan sakit. Penerapan program Jaminan kesehatan nasional ini agar dapat menjangkau seluruh aspek dan unsur kehidupan masyarakat maka direalisasikan dalam PKM dan Rumah Sakit (Kemenkes, 2014).

Peserta BPJS kesehatan berdasarkan Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan (2014) terbagi dua yakni Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Data Kementerian Kesehatan menunjukkan masih ada 142, 1 juta jiwa penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sampai dengan Desember 2014 kepesertaan program JKN berjumlah 133.423.653 peserta yang terdiri dari peserta PBI yang berjumlah 95.167.229 dan peserta non PBI berjumlah 38.256.424 peserta. Peserta PBI terdiri dari peserta dengan iuran bersumber dari APBN berjumlah 86.400.000 peserta dan yang bersumber dari ABPD berjumlah 8.767.229 peserta. Sedangkan peserta non PBI terdiri atas pekerja penerima upah berjumlah 24.327.149 peserta, pekerja bukan penerima upah berjumlah 9.052.859 peserta, dan bukan pekerja berjumlah 4.876.416 peserta (Profil Kesehatan Indonesia, 2014).

Mengingat institusi BPJS adalah institusi publik bentukan pemerintah yang memiliki kemandirian dalam bertindak, sudah merupakan tanggung jawab penyelenggara (BPJS) untuk melakukan sosialisasi program Jaminan Kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, untuk memperluas

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-

-
-
www.lib.umtas.ac.id

informasi tentang program jaminan sosial kepada masyarakat, BPJS perlu melakukan perencanaan dan desain informasi publik yang mudah dipahami dan perlu disampaikan ke masyarakat luas. Kemandirian itu perlu ditunjukkan dengan berbagai inisiatif sosialisasi dari BPJS sebagai bagian dari tugas dan kewenangan yang diberikan negara dan tidak sekedar mengharapkan pihak luar termasuk institusi pemerintah lainnya untuk mengundang, meminta, atau bahkan sekedar menunggu (Media Sosialisasi JKN, 2016).

Sejumlah persoalan masih dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selama ini kita masih menjumpai perlakuan diskriminatif terhadap peserta BPJS Kesehatan dengan pasien asuransi swasta, apalagi pasien yang membayar tunai, belakangan ini muncul juga diskriminasi terhadap peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri dan PBI. Masalah yang paling banyak dikeluhkan peserta maupun penyedia jasa pelayanan kesehatan. Dari sisi pasien, sering kali terdengar keluhan bahwa mereka mendapat pelayanan yang kurang menyenangkan, bila dibanding sesama pasien yang membayar tunai atau menjadi peserta asuransi swasta. Pemeriksaan dilakukan terburu-buru dan diobati seadanya. Tak jarang, pasien masih harus mengeluarkan sejumlah uang karena obat tertentu tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan (Suara Pembaharuan, 2015 dalam http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/problem-di-bpjs-kesehatan).

Menurut Wicaksono (2014) mengatakan bahwa hasil temuan Bappenas juga menemukan perubahan pola masyarakat di bidang kesehatan. Masyarakat yang mengerem investasinya pada sumber daya manusia bidang kesehatan

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-

-
-
www.lib.umtas.ac.id

diketahui lebih memilih membeli obat di warung ketimbang ke dokter atau tempat pelayanan kesehatan. Selain itu, penggunaan pengobatan alternatif semakin populer. Dari data didapatkan masyarakat yang menggunakan pengobatan alternatif lebih banyak dibandingkan dengan yang datang ke dokter umum.

Gaya hidup kembali ke alam (*back to nature*) menjadi tren saat ini sehingga masyarakat kembali memanfaatkan berbagai bahan alam, termasuk pengobatan dengan tumbuhan obat (herbal). Sebenarnya sudah sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya menanggulangi berbagai masalah kesehatan, jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan modern menyentuh masyarakat. Selain lebih ekonomis efek samping ramuan herbal sangat kecil. Karena itu pengguna obat herbal alami dengan formulasi yang tepat sangat penting dan tentunya lebih efektif (Redaksi Agromedia, 2008).

PKM merupakan unit teknis pelayanan dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu atau sebagian wilayah kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam rangka pencapaian keberhasilan fungsi PKM sebagai ujung tombak pembangunan bidang kesehatan (Muninjaya, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursafa (2015) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien BPJS. Pengetahuan atau kognitif

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-

-
-
www.lib.umtas.ac.id

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*ovent behavior*). Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Hal ini mengingat bahwa peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan non formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu (Notoatmodjo, 2012).

UMTAS

B. Rumusan Masalah

Model sistem kesehatan merupakan suatu model kepercayaan kesehatan yang disebut sebagai model perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor determinan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan ada tiga kategori utama, yaitu karakteristik predisposisi untuk menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda yang disebabkan karena adanya ciri-ciri individu, karakteristik kemampuan adalah sebagai keadaan atau kondisi

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-

-
-
www.lib.umtas.ac.id

yang membuat seseorang mampu untuk melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan, dan karakteristik kebutuhan merupakan komponen yang secara langsung berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memaksimalkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sampai saat ini masih banyak keluhan dan komplain yang di layangkan ke BPJS Kesehatan. Namun, setelah di telusur, hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, artinya sosialisasi masih kurang. Oleh karena itu sosialisasi perlu di gencarkan agar masyarakat semakin memahami apa arti dari BPJS Kesehatan dan bagaimana pemanfaatan terhadap BPJS.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 10 seorang peserta BPJS di Wilayah Kerja PKM Tamansari Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 Mei 2018, diperoleh hasil sebanyak 4 orang (40%) responden yang mengetahui tentang pentingnya serta manfaat BPJS sebagai program pelayanan kesehatan dan sebanyak 6 orang (60%) tidak mengetahui tentang pentingnya BPJS bagi masyarakat terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal kesehatan diantaranya:

1. Masih ada yang memilih obat warung daripada pergi ke PKM
2. Masih ada yang memilih pergi ke orang pintar

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-

-
-
www.lib.umtas.ac.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah hubungan pengetahuan peserta BPJS dengan pemanfaatan program BPJS di Wilayah Kerja PKM Tamansari Kota Tasikmalaya".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan peserta BPJS dengan pemanfaatan program BPJS di Wilayah Kerja PKM Tamansari Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

a. Diketahuinya gambaran pengetahuan peserta BPJS tentang program BPJS di Wilayah Kerja PKM Tamansari Kota Tasikmalaya.

b. Diketahuinya gambaran pemanfaatan program BPJS di Wilayah Kerja PKM Tamansari Kota Tasikmalaya

c. Menganalisis hubungan pengetahuan peserta BPJS dengan pemanfaatan program BPJS di Wilayah Kerja PKM Tamansari Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara teoritis maupun praktis mengenai profesi keperawatan khususnya dalam pemanfaatan pelayanan jaminan kesehatan.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-

-
-
www.lib.umtas.ac.id

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

   Sebagai bahan referensi di perpustakaan atau sumber data bagi peneliti lain yang memerlukan masukan berupa data atau pengembangan penelitian dengan topik yang sama. Serta menambah referensi dan menjadi salah satu acuan peneliti selanjutnya mengenai pemanfaatan program kesehatan.

3. Bagi Profesi Keperawatan

   Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan profesi keperawatan, khususnya dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat guna mencerdaskan masyarakat dalam bidang kesehatan.

4. Bagi PKM Tamansari Kota Tasikmalaya

   Data yang dapat dipergunakan sebagai informasi dan masukan pada PKM Tamansari dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersumber dari BPJS.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dalam mengembangkan penelitian terkait dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

UMTAS

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2018
-
-